

**ANALISIS DANA NON HALAL DALAM PEMBIAYAAN *QORDHUL*
HASAN PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

SITI ZUBAIDAH

NPM: 1421030177

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARI'AH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2018 M

**ANALISIS DANA NON HALAL DALAM PEMBIAYAAN *QORDHUL*
HASAN PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

SITI ZUBAIDAH

NPM: 1421030177

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Pembimbing I : Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.A g., M.H.

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag

FAKULTAS SYARI'AH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2018 M

ABSTRAK

Dalam lembaga keuangan syari'ah, akad yang dijalankan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Selain produk dan layanan yang bersifat komersial, lembaga keuangan syari'ah juga melaksanakan fungsi sosial melalui aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (zakat, infaq, shodaqoh dan hibah) serta dana kebajikan (*qardh & qardhul hasan*) yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, pinjaman ini disalurkan kepada kaum dhu'afa dari segi ekonomi. Jika ada yang tidak dapat membayar pinjaman tersebut karena keadaan di luar kuasa peminjam (*force majeure*), maka peminjam tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman tersebut.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana penggunaan dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan*?. Kedua, bagaimana analisis dana non-halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* perspektif *maqashid al syari'ah* ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* serta untuk mengetahui analisis dana non-halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* perspektif *maqashid al syari'ah*.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (Library research) mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, majalah, artikel, ataupun naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* serta dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode deksriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perbankan syari'ah bahwa pembiayaan *qardhul hasan* benar-benar diaplikasikan di perbankan syari'ah. Hal tersebut sejalan dengan teori yang ada bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari dana non halal. Jika dilihat dari segi *maqashid syari'ah*, pembiayaan *qardhul hasan* benar-benar memiliki nilai kemaslahatan dan mampu menjaga 5 aspek pokok (*al-daruriyyat al-khams*). Maka pembiayaan *qardhul hasan* meski salah satu sumber dananya terdapat dana non halal, hukumnya diperbolehkan karena dana tersebut haram bagi pemiliknya namun tetap halal bagi penerimanya



KEMENTERIAN AGAMA RI.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS DANA NON HALAL DALAM
PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
PERSPEKTIF MAQASHID
AL-SYARI'AH**

Nama : **Siti Zubaidah**
NPM : **1421030177**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Muamalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.A g., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag
NIP. 197504282007101003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.A g., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS DANA NON HALAL DALAM PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**, disusun oleh **Siti Zubaidah NPM.1421030177** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu/19 September 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Marwin, S. H., M. H.

(.....)

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, S. H.I., M. H

(.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin Tahmid., M. H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M. H.(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung



Dr. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.¹

(QS. Al-Hadiid: 11)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 538.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayah Moh. Kholil dan Ibu Ulfatur Rohmah yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini serta keberhasilan di masa depan.
2. Kakak dan adik-adikku Mutmainnah, Qonita dan Farhat Abdullah yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis.
4. Keluarga besar tersayang dan guru-guru serta sahabat tersayang di pulau Madura.
5. Para Dosen Pembimbing Bapak Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.A g., M.H dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Siti Zubaidah dilahirkan di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 1996, anak kedua dari pasangan Bapak Moh. Kholil dan Ibu Ulfatur Rohmah. Memiliki 3 saudara kandung yaitu Mutmmainnah, Qonita dan Farhat Abdullah.

Pendidikannya ditempuh di TK Dharma wanita Tanah Merah Madura lulus pada tahun 2001, melanjutkan SD di MMA IV Sukabumi Bandar Lampung selama 4 tahun lalu berpindah kembali ke Madura di SDN Petrah 01 Tanah Merah Madura lulus pada tahun 2008, MTs An-Namirah lulus pada tahun 2011, MA An-Namirah lulus pada tahun 2014, melanjutkan di Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, lulus tahun 2018. Penulis mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung dalam beberapa organisasi intra kampus, yaitu UKM Bapinda, UKMF Gemais Fakultas Syari'ah, Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidik Misi, Komunitas Minat Baca, serta Komunitas Mata Pena Fakultas Syari'ah.

Penulis juga turut aktif sebagai jurnalis di Fakultas Syari'ah serta menjadi kontributor Media Online MUI Lampung. Selain itu, penulis juga turut andil sebagai delegasi dalam beberapa lomba debat konstitusi yang diadakan oleh Fakultas Syari'ah, MK dan MPR dan berhasil meraih juara 2.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS DANA NON HALAL DALAM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar- sebesarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far., M.H., juga selaku Pembimbing I dan Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mencari ilmu serta Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Komunitas Mata Pena Fakultas Syariah, Bapak Abdul Qodir Zaelani, M.A. dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H sebagai pembimbing yang telah memberikan kesempatan lebih luas untuk menyelam di dunia literasi, juga keluarga Mata Pena lainnya Dewi Yulianti, S. H., Nur Fatmawati Anwar, S. H., Ela Novita Sari, S. H., Rizki Idsam Matura, Ria Ristiani, Thiara Pareza dan seluruh anggota baru terima kasih atas segalanya.
7. Segenap pengurus dan kader-kader UKM Bapinda dan UKMF Gemais yang telah memberikan banyak pelajaran dalam hidup.
8. Keluarga Media Center Bapinda, Ahmad Afini, S. E., Arif Nur Hidayat, S. E., Rivan Zainuri, S. E., Siti Nurrohmah, S. E., dan Dewi Nurlaili, S. Pd terima kasih atas setiap semangat dan kebersamaannya yang sangat bermakna.
9. Bapak Iskandar Muda, S. H., M. H yang telah menjadi pembimbing debat hingga penulis pernah meraih juara dan pengalaman yang luar biasa serta tim debat Raeshita Dziljianda, Rizky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf.
10. Segenap jajaran Presidium Demissioner 2015 dan 2016 serta Mata Panah Srikandi (Atika, Aulia, Nurul, Santi, Olga, Lutfi, Izza dan Nurtiarasari terima kasih akan ukhuwah islamiyah yang terjalin.
11. Penyemangat dan pendengar yang baik Ela, Atika dan Dek Wulan.
12. Geng Gemes (Gerakan Menyelesaikan Skripsi) terima kasih telah mencharge semangat untuk tetap mengerjakan skripsi setiap harinya hingga skripsiku selesai.
13. Rekan- rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2014 Nur Anisa, Aulia Gustin Siska R, Arin Ika Septi, Hasiyah, Venty Oktamelya, Chassilda dan seluruhnya khususnya Mu'amalah kelas F.
14. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Siti Zubaidah



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Tinjauan Pustaka	18
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN <i>QARDHUL</i>	
<i>HASAN DAN MAQASHID SYARI'AH</i>	
A. Tinjauan Umum tentang <i>Qardhul Hasan</i>	22
1. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Qardhul Hasan</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Qardhul Hasan</i>	40
4. Sumber Dana <i>Qardhul Hasan</i>	43

5. Aspek Teknis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	47
B. Tinjauan Umum tentang <i>Maqashid Syari'ah</i>	51
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	51
2. Klasifikasi <i>Maqashid Syari'ah</i>	56
C. Konsep Halal Haram dalam Islam	66
BAB III DANA NON HALAL DALAM PEMBIAYAAN <i>QARDHUL HASAN</i>	
A. Tinjauan Umum tentang Dana Non Halal	72
B. Penggunaan Dana Non Halal dalam Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	81
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Dana Non Halal dalam Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i>	90
B. Analisis Dana Non-Halal dalam Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Perspektif <i>Maqashid Al Syari'ah</i>	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Analisis Dana Non Halal dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah**”. Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahaminya.

Dana non-halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syari’ah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syari’ah.² Dana non-halal ini juga sering disebut dengan dana atau pendapatan yang meragukan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, **pembiayaan** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syari’ah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syaria’ah.³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat penulis

² Nur Hasanuddin, Iva Harlianti Sholikha, *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Ziswaf Jurnal zakat dan waqaf, Vol 1, No. 1, (Juni 2014), h. 14.

³ Ismail, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 106.

tarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah aktivitas bank syari'ah dalam melakukan penyaluran dana kepada pihak lain sesuai dengan skema syari'ah.

Qardhul Hasan secara bahasa terdiri dari dua kata, *Qardh* dan *Hasan*. *Qardh* atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi mu'amalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴ Dalam teknis perbankan, *Qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.⁵ Adapun *hasan* berasal dari bahasa Arab yaitu *ihsan* yang artinya kebaikan kepada orang.⁶ *Qardh al Hasan* adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force*

⁴ Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Muj'am al-Iqtisad al-Islami*, (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987); Sayyid Sabiq, *Fihus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke 8, vol. III, h. 163.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 675.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342-343.

*majeure*⁷ yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.⁸

Maqashid Al-Syari'ah, secara *lughawi*, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *ilal maa'i* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara *ishtihlahy*, *maqashid al-syari'ah* seperti yang dikemukakan oleh al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyari'atkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambaNya di dunia dan kelak di akhirat.⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah pokok di atas, dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah **Analisis Dana Non Halal dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perspektif Maqashid Syari'ah**.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal alasan menarik, sehingga memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul ini yaitu:

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Op. Cit.*, hlm. 676.

⁸ *Ibid*, hlm. 278.

⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Aahkam*, Juz ke 2, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), hlm. 2.

1. Alasan Obyektif

Alasan obyektif yang membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini adalah:

- a. Problematika dalam penetapan akan fakta halal atau haram sumber dana non halal dalam akad *qardhul hasan* jika dilihat dari segi tujuan dan hikmat pensyari'atannya (*maqoshid al-syari'ah*). Terlebih akad *qardhul hasan* ini merupakan akad yang sangat membantu perekonomian sektor pengusaha kecil serta nasabah yang tidak mampu khususnya di Indonesia.
- b. Karena penulis menginginkan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang hukum dana non halal dalam akad *qardhul hasan* untuk melalui pandangan atau perspektif *maqoshid al-syari'ah*.

2. Alasan Subyektif

Alasan subyektif yang membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini di antaranya:

- a. Pokok bahasan mengenai *qardhul hasan* ini belum pernah di bahas oleh kakak tingkat terdahulu dalam penyusunan skripsinya di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- b. Penelitian mengenai *qardhul hasan* yang ditinjau dari *maqoshid syari'ah* ini menjadi menarik karena menganalisis hukumnya ditinjau dari kemaslahatan yang terdapat dalam tujuan syari'at. Terlebih hal ini merupakan produk pembiayaan dalam perbankan

syari'ah yang digemari oleh penguasa-pengusaha kecil. Maka dalam hal ini sesuai dengan jurusan yang penulis ambil yakni Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

- c. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia di perpustakaan sehingga memudahkan penulis untuk membahas judul ini.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam lembaga keuangan syari'ah, akad yang dijalankan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁰ Selain produk dan layanan yang bersifat komersial, lembaga keuangan syari'ah juga melaksanakan fungsi sosial melalui aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (zakat, infaq, shodaqoh dan hibah) serta dana kebajikan (*qardh & qardhul hasan*) yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan kepada kaum dhu'afa dari segi ekonomi.¹¹ Namun dalam praktiknya, terdapat keraguan antara sumber dana yang diambil untuk pendistribusiannya. Keraguan tersebut

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 75.

terletak pada sumber dana yang digunakan serta tujuan pendistribusiannya, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) itu sendiri dimana sebagian dana yang digunakan dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini diambil dari pendapatan-pendapatan yang diragukan atau biasa disebut dana non-halal.

Sumber dana *qardhul hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah. Selain sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama', melihat adanya sumber dana lain yaitu pendapatan-pendapatan non halal seperti jasa nostro pada bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C pada bank asing,¹² pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan-pendapatan non halal lainnya.¹³ Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non-muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab pada bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir

¹² *Ibid*, h. 133.

¹³ Ismail, *Op. Cit.*, h. 218.

tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.¹⁴

Meskipun sejatinya tak semua bank syari'ah menyediakan pembiayaan *qardhul hasan*, namun dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* ini telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Salah satu manfaatnya adalah pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syari'ah untuk membantu masyarakat miskin.¹⁵ Hal ini sesuai dengan akad *qardhul hasan* yang merupakan akad tabarru' dimana pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.¹⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah surat al-Hadiid: 11;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Atinya: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.¹⁷

Namun hal yang perlu diperhatikan adalah sumber dana yang digunakan untuk menyalurkan dana kebaikan tersebut. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *halal wal haram fil Islam* menjelaskan, barangsiapa yang

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Loc. Cit.*

¹⁵ *Ibid*, h. 220.

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 538.

mengumpulkan harta dengan riba, maksiat, permainan yang diharamkan, judi atau apa saja amalan yang diharamkan untuk membina masjid atau untuk projek-projek kebajikan atau sebagainya, maka hal tersebut tidak menjadi syafaat sekalipun niat tujuannya adalah baik dan juga tidak dapat menghilangkan dosa perbuatan haram. Karena dalam Islam, perkara yang diharamkan terkesan dengan niat dan tujuan yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ
أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ
حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ حَارُهُ بِوَائِقِهِ قَالُوا وَمَا بِوَائِقِهِ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيَنْفَقَ مِنْهُ
فَيَبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ
زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ
بِالْحَسَنِ إِنَّ الْحَبِيثَ لَا يَمْحُو الْحَبِيثَ¹⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Aban bin Ishaq dari Ash Shabah bin Muhammad dari Murrah Al Hamdani dari Abdullah bin Mas'ud

¹⁸ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: 'Alimul Kutub, 1998 M), h. 387.

ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah membagikan akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagikan rizki di antara kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai maupun tidak, sedangkan Dia memberikan agama hanya kepada yang Dia cintai, barangsiapa yang diberi agama oleh Allah, maka Dia telah mencintainya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, seorang hamba tidak akan selamat hingga hati dan lisannya selamat, dan tidak beriman seseorang hingga tetangganya merasa aman dari kejahatannya." Mereka bertanya; Apakah kejahatannya itu wahai Nabiyullah? Beliau menjawab: "Menganiaya dan menzaliminya. Dan tidaklah seorang hamba mencari harta yang haram lalu membelanjakannya lantas ia diberkahinya dan tidaklah bersedekah lantas diterima darinya dan tidaklah ia meninggalkan di belakang punggungnya melainkan akan menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menghapus keburukan akan tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan, sesungguhnya keharaman tidak dapat menghilangkan keharaman pula."

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ
بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ
بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ} قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا
رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ

حَدِيثُ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ
الْأَشْجَعِيَّةِ¹⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq dari Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul, Dia berfirman: "Wahai para rasul, Makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang Ku berikan padamu." Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdo'a; "Ya Rabb, ya Rabbi, " sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan do'anya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib. Kami hanya mengetahuinya dari hadits Fudlail bin Marzuq. Abu Hazim adalah Al Asyja'i, namanya adalah Salman, bekas budak 'Azzah Al Asyja'i.²⁰

Pada hadis di atas menunjukkan bahwa ketidakbolehan mencampuradukkan yang halal dengan yang haram walaupun tujuannya untuk kebaikan. Namun, jika dilihat dari konteks realita zaman sekarang, seperti akad *qardhul hasan* menjadi sesuatu yang sangat membantu perekonomian rakyat kecil. Setiap pedagang kecil yang tak memiliki dana

¹⁹ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar El Fikr, 2005 M), h. 849.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, terjemahan Mu'ammal Hamidy, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 21.

untuk mengembangkan usahanya, orang miskin, nasabah yang membutuhkan dana talangan jangka pendek, dapat meminjam pada bank syari'ah tanpa adanya tambahan saat pengembalian dan bahkan jika terjadi *force majeure* atau sesuatu diluar kuasa manusia, dana pinjaman tersebut tidak apa jika tidak dikembalikan. Maka, *qardhul hasan* merupakan sebuah solusi untuk memberikan kemaslahatan bagi umat muslim khususnya yang berkekurangan. Namun, fakta halal atau haramnya pun masih meragukan.

Jika terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis dengan *maqashid al-syari'ah* dilihat dari ruh syari'ahnya. Sebab diyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama yang sempurna. Maka dapat dipahami bahwa al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai *Rahmatan lil 'Alamin* yang merupakan inti syari'ah atau hukum Islam.²¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisa hukum dana yang masih diragukan tersebut dalam pembiayaan akad *qardhul hasan*. Serta apakah akan tercapai tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) jika pembiayaan yang sejatinya berguna untuk menolong perekonomian pelaku usaha kecil tersebut terdapat unsur dana non-halal

²¹ Maimun, *Pendekatan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Asas*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2012), h. 2.

dilihat dari sisi hikmah dan tujuan pensyari'atannya. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul “**Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”**”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan*?
2. Bagaimana analisis dana non-halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* perspektif *maqashid al syari'ah*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan sehingga penulis melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *qardhul hasan* dengan dana non-halal.
- b. Untuk mengetahui analisis dana non-halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* perspektif *maqashid al syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan informasi tentang praktik pembiayaan *qardhul hasan* dengan dana non-halal serta analisisnya dalam perspektif *maqashid al syari'ah*.
 - 2) Memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah dalam menetralsisir keraguan akan fakta halal atau haram perspektif *maqoshid al-syari'ah*.
- b. Kegunaan Praktis
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, sivitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
 - 2) Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi

dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, majalah, artikel, ataupun naskah-naskah lainnya.²² Hal ini difokuskan teks-teks yang memperbincangkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang berkaitan dengan dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Selanjutnya konsep *maqoshid al syari'ah* dalam memandang pembiayaan dana non halal dalam *qardhul hasan* tersebut.

Penelitian dengan jenis kepustakaan ini juga sesuai dengan topik yang dibahas guna untuk mempertajam permasalahan agar semakin jelas arah dan bentuknya.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitik²⁴ yaitu memaparkan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian di analisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan tentang analisis sumber dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* perspektif *maqoshid al syari'ah*.

3. Metode Pengumpulan Data

²² Koentjaraningrat dalam Soedjatmoko (dkk), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 256.

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 64.

²⁴ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 45.

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan ini, maka digunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif,²⁵ dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian serta didukung dengan data-data di lapangan. Penelusuran tersebut diambil dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Sumber Data Primer, adalah sumber data atau merupakan bahan-bahan yang mengikat²⁶ dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yakni kitab, buku atau literatur asli dalam hal ini adalah al-Qur'an, hadis, kitab atau buku tentang analisis sumber dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* perspektif *maqoshid al syari'ah*.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.²⁷ Dalam hal ini adalah data yang di dapat dari lapangan, pendapat para ahli serta ulama' mengenai sumber dana *qardhul hasan* yang digunakan dalam *perspektif maqoshid al syari'ah*.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 75.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121.

²⁷ S.a Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kulitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 26.

- c. Sumber Data Tersier, adalah sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder,²⁸ seperti kamus, ensiklopedia, dan beberapa jur'nal mu'amalah serta hukum yang berkaitan dengan substansi pembahasan.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.²⁹

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing Data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Kalsifikasi Data, yaitu mereduksi data yang ada dengan cara yang menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- c. Verifikasi Data, yaitu mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
- d. Sistematisasi Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

²⁸ Merry Fitriyanti, *Pendapat Empat Madzhab tentang Mathla'dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah (Perspektif Astronomi)*, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 15.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Peneitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 199.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan deksriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif, yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Ada beberapa alasan peneliti menggunakan metode induktif yaitu, yaitu *yang pertama*, sudah jelas untuk cara kerja penelitian yang bersifat kualitatif, maka menggunakan metode berpikir induktif. *Kedua*, metode induktif didasarkan pada fenomena empiris yang umumnya hanya berfokus kepada sebagian kecil dari fenomena tersebut yang relevan dengan permasalahan yang diamatinya. Hal ini sesuai dengan topik yang dibahas. Penelitian ini berupaya untuk menemukan hubungan empiris, maka dari inilah pendekatan induktif bersifat deskriptif.³⁰

Metode deskriptif analisis kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara bertahap yakni ketika penulis mendapatkan data, maka data tersebut dapat langsung dianalisa sehingga bisa menjadi data yang valid. Kemudian setelah semua data terkumpul dilakukan analisa berlapis yakni menganalisa dari awal guna untuk melihat kesesuaian rumusan masalah dengan jawaban yang diperoleh.

³⁰ Maria, *Pengertian Metode, dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif* (On-Line), tersedua di: Mariariberu.blogspot.co.id, published: 26 Maret 2015.

G. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai dana non halal serta sumber dan penggunaan dana pada *qardhul hasan* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Hermawan A. N dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh* dan *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta”.³¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, sumber dana *qardul hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan pendapatan non halal dan jumlah dana *qardul hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta yang berhasil terkumpul dari tahun 2004 hingga saat ini ialah sebesar Rp. 10.730.899.-, jadi penghimpunan dana *qardul hasan* per tahunnya ialah Rp. 2.682.725.-. Pendistribusian dana *qardul hasan* hanya dialokasikan kepada warga dhu'afa yang berdomisili di sekitar Kantor Cabang Bank BRI Syari'ah Yogyakarta.

³¹ Hendri Hermawan A. N, Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh* dan *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Vol. II, No. 2 (Desember, 2008), h. 271.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Purwadi Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul “*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari’ah*”.³² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) perbankan syariah dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Penerapan program CSR tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui produk pembiayaan. Pada Bank Muamalat tersebut, program CSR dilakukan melalui salah satu produk pembiayaan, yaitu produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai wujud misi sosial perbankan syariah. Pelaksanaan kegiatan sosial tersebut bersumber dari dana ZIS (*Zakat, Infaq, Shodaqoh*) Bank Muamalat, karyawan dan nasabah, dana CSR, dan dana sosial lainnya, serta dana non halal yang diterima Bank Muamalat seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional.

³² Muhammad Imam Purwadi, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari’ah*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1. Vol. 21 (Januari, 2014), h. 24.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alwina Putri Dwigita Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* dan Program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi pada BNI Syari’ah Kantor Cabang Tanjung Karang)”.³³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada BNI Syariah KC Tanjung Karang memiliki pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* dan dana yang digunakan bersumber dari dana yang diterima dari zakat, infaq, sedekah dan hasil pendapatan non halal bank seperti denda akibat keterlambatan pembayaran dan pendapatan dana dalam melakukan transfer pada bank koresponden yang konvensional. Sedangkan untuk mengimplementasikan program-program I-CSR pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang telah menyisihkan laba setelah pajak sebesar 2,5% yang dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³³Alwina Putri Dwigita, *Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Program Islamic Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi pada BNI Syari’ah Kantor Cabang Tanjung Karang)*. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 193-194.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, pembahasan mengenai penerapan *qardhul hasan* dan sumber dananya sangat penting untuk menjadi pendukung dalam skripsi ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah titik fokus sesuatu yang diteliti. Penelitian sebelumnya hanya membahas terkait penerapan *qardhul hasan* dalam perbankan syari'ah dan wujud kesejahteraan sosial dari penerapan tersebut. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai sumber dana yang terkandung dalam pembiayaan *qardhul hasan* yakni dana non halal yang ditinjau dari *maqashid syari'ah* yang mana tujuan pembiayaan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *QARDHUL HASAN* DAN *MAQASHID SYARI'AH*

A. Gambaran Umum tentang *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara bahasa terdiri dari dua kata, *Qardh* dan *Hasan*. *Qardh* atau *Iqradh* secara etimologi berarti pinjaman atau utang³⁴. Secara terminologi mu'amalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwuwi* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁵

Qardh secara bahasa artinya adalah *al-qath'u* (memotong), dinamakan demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya. Memberikan utang ini merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang. Rasulullah menamakannya *maniiahah*, karena orang yang

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2009), h. 337.

³⁵ Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Muj'am al-Iqtisad al-Islami*, (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987); Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke 8, vol. III, h. 163.

meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang.³⁶

Dalam teknis perbankan, *Qardh* diartikan sebagai akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.³⁷

Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyatakan bahwa *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁸

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 Ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “akad *qardh*” adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib

³⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehar-hari*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 209.

³⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 675.

³⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Pasal 1 ayat (11).

mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.³⁹

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* menyatakan bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁰

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia memberikan pengertian bahwa *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dari LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁴¹

Adapun *hasan* berasal dari bahasa Arab yaitu *ihsan* yang artinya kebaikan kepada orang.⁴² Dalam hadits yang diriwayatkan Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya.

³⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 ayat (1e).

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 131.

⁴¹ MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 129.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342-343.

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ⁴³

“Kemudian dia berkata lagi: “ Beritahukan aku tentang ihsan “.

Lalu beliau bersabda: “ Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau” (HR. Muslim).

Herman Darmawi dalam bukunya yang berjudul Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial menyatakan bahwa Al-Qardhul Hasan adalah suatu produk perbankan syariah di mana bank menyediakan fasilitas dana kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Fasilitas ini biasanya diberikan kepada nasabah yang betul-betul membutuhkan dan berhak menerimanya.⁴⁴

Ismail menyatakan bahwa *qardh ul hasanah is beautiful loan, which is primarily a business transaction that establish a relationship of lender and borrower.*⁴⁵ Qardhul hasan adalah pinjaman kebajikan yang pada dasarnya adalah sebuah transaksi bisnis yang membentuk hubungan antara pemberi pinjaman dengan peminjam.

⁴³ Imam Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qushayri an-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, (tt: 162 H), h. 23.

⁴⁴ Dawmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, cet.I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.86

⁴⁵ Falikhatun dkk, *Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 20, No. 1 (Januari 2016), h. 96, mengutip Abdul Ghafar Ismail. *Money, Islamic Banks and the Real Economy* (Cengage Learning Asia Pte Ltd, 2010) h. 72.

Sementara itu Abdul Rahman mendefinikan *Qardh as the transfer of ownership of an asset or money from the original owner to others on condition that the asset or money will be returned to the owner in the same condition/form/ value as when it first received by the other party from the owner.*⁴⁶ *Qardhul hasan* sebagai pengalihan kepemilikan aset atau uang dari pemilik asli kepada orang lain dengan ketentuan bahwa aset atau uang akan dikembalikan kepada pemilik dalam kondisi/bentuk/nilai yang sama seperti saat pertama kali diterima oleh pihak lain dari pemilik.

Pemaknaan *qardhul hasan* tersebut sesungguhnya tidak berbeda secara substantif dengan beberapa penulis sebelumnya antara lain *Qardhul Hasan is charitable loans with no interest, or a zerointerest bearing loan, with low expectations of return of capital.*⁴⁷ *Qardhul hasan* adalah pinjaman sosial dengan tanpa keuntungan dan pinjaman tanpa bunga, dengan tidak terlalu berharap pengembalian modal.

Selanjutnya makna *qardhul hasan* juga bisa didefinisikan sebagai *purely a benevolent act, and it is extended to others without interest or any other compensation from the borrower and can be expected a*

⁴⁶ *Ibid*, mengutip Hj Zaharuddin Abdul Rahman. *Management Fees in Qardhul Hasan* (NST Bussines Times, September 20th 2006)

⁴⁷ *Ibid*, mengutip Zamir Iqbal, dkk. *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. 2007). Lihat juga Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, (Manama: 2008)

*reward only from God.*⁴⁸ *Qardhul hasan* dimaknakan sebagai murni tindakan yang baik dan hal ini diperluas ke orang lain tanpa bunga atau kompensasi lainnya dari peminjam dan imbalan hanya mengharap pada Tuhan.

Demikian pula Ahmad Ifham Sholihin dalam bukunya *Pintar Ekonomi Syari'ah* menyatakan bahwa *Qardh al Hasan* adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force majeure*⁴⁹ yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.

Kemudian Warkum Sumitro memberikan penjelasan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman, akan tetapi bank

⁴⁸ Ibid, mengutip dari Askari dkk. *New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges*. John Wiley & Sons (Asia: 2008) Pte Ltd.

⁴⁹ Ahmad Ifham Sholihin, Op. Cit., hlm. 676.

dibernarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari peminjam sebagai tanda terima kasih yang besarnya tidak ditentukan sebelum akad, ini sunnah.⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman (*muqtaridh*) dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syari'ah kepada peminjam (*muqridh*) yakni nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama pada saat meminjam tanpa ada tambahan sedikitpun. Jika nasabah ingin memberikan tambahan pembayaran atas pinjaman yang dipinjam dapat diperbolehkan selama tidak ada kesepakatan di awalnya dengan Lembaga Keuangan Syari'ah selaku pemberi pinjaman, melainkan atas inisiatif nasabah sendiri. Namun apabila nasabah tidak mampu membayar disebabkan karena keadaan di luar kuasa (*force majeure*) maka nasabah tidak wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya tersebut. Inilah sisi kebaikan atau yang disebut dengan hasan.

⁵⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia*, Ed. 1., Cet. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 101.

2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Hadiid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْ لَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*⁵¹

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”⁵² artinya

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 538.

⁵² Yaitu dengan berinfak di jalan Allah dengan niat yang ikhlas dan keyakinan yang benar, termasuklah dia ke dalam ayat ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, “Ketika turun ayat, ‘Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya’, Abu Dahdah al-Anshari mengatakan, ‘ya Rasulullah, Allah menginginkan pinjaman dari kami?’ Rasulullah menjawab, ‘Betul, hai Abu Dahdah.’ Dia kemudian berkata, ‘Perlihatkan kepadaku tanganmu ya Rasulullah.’ Lalu Rasulullah mengulurkan tangannya kepadanya. Abu Dahdah pun berkata, ‘Sesungguhnya aku telah meminjamkan kebunku kepada Tuhanku.’ Ketika itu kebun yang menjadi miliknya itu memiliki 600 pohon kurma sedangkan Ummu Dahdah dan keluarganya berada di sana. Kemudian Abu Dahdah datang dan menyeru, ‘Hai Ummu Dahdah.’ Dijawabnya ‘Ya’. Katanya lagi, ‘Keluarlah kamu dari sana karena aku telah meminjamkannya kepada Tuhanku.’ Dalam riwayat lain dikatakan Ummu Dahdah berkata, ‘Kalau begitu perniagaanmu ini akan beruntung, hai Abu Dahdah.’ Dan ia segera memindahkan barang-barang dan anak-anak kecilnya dari sana. Dan Rasulullah mengatakan, ‘Betapa banyaknya tandan anggur dan wangi-wangian yang disediakan untuk Abu Dahdah di dalam surga.’ Di dalam riwayat lain, ‘Betapa banyaknya pohon kurma yang rindang ditaburi permata dan mutiara yang disediakan untuk Abu Dahdah di dalam surga.’

membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan hal tersebut, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia” sebagai bagian dari hidup bermasyarakat.⁵³ Karena ketika kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan bentuk *ta'awun* yang dianjurkan dalam Islam.

2) QS. al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan⁵⁴.

Sama halnya dengan ayat sebelumnya, ayat di atas memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam membantu sesama manusia dan Allah memberikan janji akan melipat gandakan rezeki kepada siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 132.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 29.

3) QS. Al-Hadiid: 18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.*⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan yang bersedia untuk meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dalam artian ikhlas memberikan pinjaman atau bahkan berinfak karena Allah kepada sesama manusia yang sedang dirundung kesusahan maka Allah akan melipatgandakan rezeki mereka.

4) QS. At-Taghabun: 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: *Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya*

⁵⁵ Ibid, h. 539.

*kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.*⁵⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah senantiasa akan mengampuni dan melipatgandakan rezeki bagi siapa saja yang niat tulus dan ikhlas membantu saudaranya yang sedang dalam kesempitan.

b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً⁵⁷

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR Ibnu Majah)

Hadist di atas memberikan gambaran bahwa ketika seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya hal tersebut sama dengan bersedekah. Karena ketika seorang muslim memberikan pinjaman, hal tersebut merupakan bentuk ta'awun

⁵⁶ *Ibid*, h. 557.

⁵⁷ Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam* No. 2421 dari Ibnu Hibban dan Baihaqi.

dalam melapangkan kesempitan sesama muslim dan Allah sangat menyukainya.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم - مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا
كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ⁵⁸

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari sesuatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambaNya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim." (Dikeluarkan oleh Imam Muslim)

Sama halnya dengan hadist sebelumnya, hadist di atas memberikan penjelasan bahwa Allah akan memberikan balasan yang luar biasa bagi siapa saja yang meringankan beban saudara semuslim dengan membebaskan kesulitannya di hari kiamat dan

⁵⁸ Al-‘Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Riyad: Dar Athlas, 2000), Juz 2, h. 208.

Allah akan senantiasa memberikan kemudahan di dunia dan akhirat bagi siapa saja yang saling tolong menolong sesama muslim.

c. Ijma'

Para ulama' telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kehidupan manusia.⁵⁹

d. Fatwa DSN

Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* merupakan fatwa yang mengatur mengenai *Al-Qardh*. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:⁶⁰

1) Ketentuan Umum *Al-Qardh*

- a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 133.

⁶⁰ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 132.

- b) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Sanksi

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

- c) Jika barang jaminan tidak mencukup, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

e. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁶¹

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Hal tersebut mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syari’ah.

f. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah

Pasal 1 Nomor 25d BAB I Ketentuan Umum menyatakan bahwa pembiayaan yang terdapat di Perbankan Syari’ah salah satunya adalah *qardh* “transaksi pinjam meminjam dalam

⁶¹ Imam Jalaluddin & Abdurrohman As-Suyuti, *Al Asybah Wan Nadho’ir Fi Qowa’idi Wa Furu’i Fiqhis Syafi’iyah*, Cetakan Kedua, Muhaqqiq: Markas Kajian dan Pembahasan di Maktabah Nazzar Al-Baz (Riyadh: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997).

bentuk piutang qardh".⁶² Selanjutnya dalam pasal 19 Ayat 1 huruf e BAB IV Bagian Kesatu tentang Jenis Dan Kegiatan Usaha menyebutkan, "*menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah*".⁶³ Begitupun dalam Penjelasan yang menyebutkan pengertian qardh, "*akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati*".⁶⁴

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pasal 612-616 Bagian Pertama Ketentuan Umum Qardh BAB XXVII Buku Kedua menyatakan bahwa:⁶⁵

- a) Pasal 612, Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- b) Pasal 613, Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.

⁶² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pasal 1 nomor (25d).

⁶³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pasal 19 ayat (1e).

⁶⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 ayat (1e).

⁶⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Bagian Pertama tentang Ketentuan Umum Qardh Pasal 612-616.

- c) Pasal 614, Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- d) Pasal 615, Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
- e) Pasal 616, Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:
- i. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - ii. menghapus / *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.
- 3) Peraturan Bank Indonesia
- Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menyatakan bahwa *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶⁶

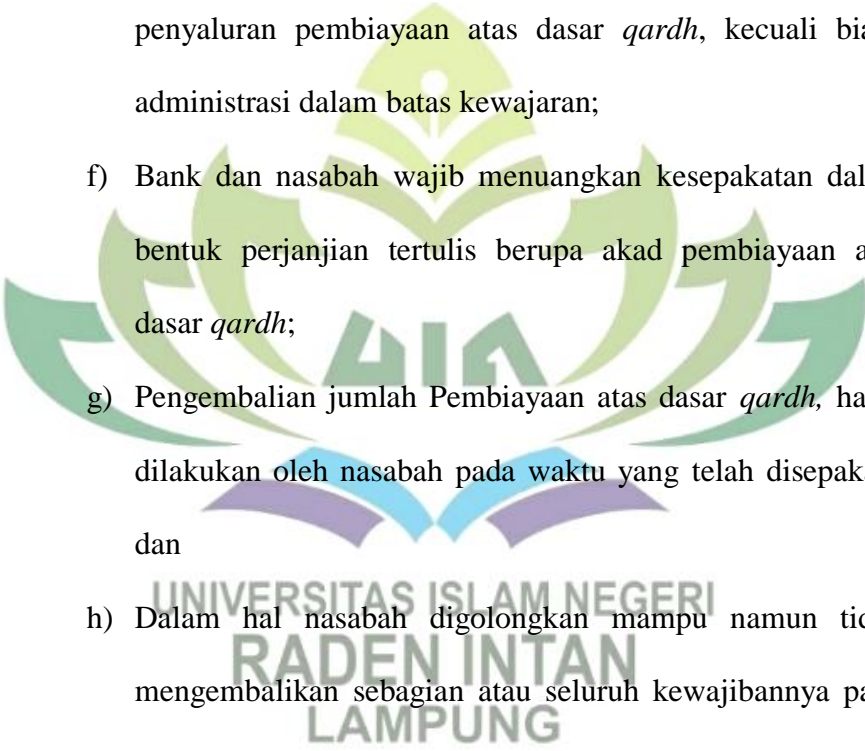
⁶⁶Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat (11) dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi Bank Syariah.

4) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/2008

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah menyebutkan bahwa pembiayaan atas dasar akad *qardh* dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁶⁷

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c) Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*);

⁶⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah nomor 8.

- 
- d) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
 - e) Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
 - f) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *qardh*;
 - g) Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
 - h) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

3. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Rukun dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yakni sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam) yakni pihak yang membutuhkan dana dan *muqridh* (pemberi pinjaman) yakni pihak yang memiliki dana;
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
- c. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-); dan *Shighah*, yaitu *Ijab dan Qabul*.⁶⁸

Sedangkan syarat dari pembiayaan *Qardul Hasan* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Syarat *Muqtaridh* dan *muqrid* (pihak-pihak yang mengadakan akad *Qardhul Hasan* harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dapat membedakan apa yang baik dan buruk, berakal sehat dan sudah berusia dewasa (baligh) sehingga mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.⁶⁹
- b. Syarat *ijab dan qobul* (sighat), merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dan salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.

Adapun ketentuan syariah *Ijab Qabul*, yakni :

48. ⁶⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), ed. 1, cet. 4, h.

⁶⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada), 1997. h 34

- 1) Janganlah akad *Qardhul Hasan* itu akad yang dilarang syara' artinya pembiayaan *Qardhul Hasan* harus sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba (bunga) dengan tidak mensyaratkan imbalan pada pinjaman.
 - 2) Keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya ijab itu berjalan terus (tidak dicabut) sebelum terjadi qabul. Jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 - 3) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, artinya makna antara ijab dan qabul sama, meskipun lafadz keduanya berlainan.⁷⁰
- c. Syarat *Qardh* (dana), adapun ketentuannya sebagai berikut :
- 1) *Qardh* yang dipinjamkan harus jelas wujud dan jumlahnya, misalnya dalam pemberian pinjaman uang pada pembiayaan *Qardhul Hasan* jelas berapa jumlah uang yang akan dipinjamkan.
 - 2) *Qardh* telah ada ketika akad *Qardhul Hasan* dilaksanakan, sehingga pinjaman tersebut dapat diserahkan pada saat akad terjadi/ pada waktu yang telah disepakati.
 - 3) Harta yang dipinjamkan mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada pihak peminjam seperti

⁷⁰ Helmi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2005), h. 47

meminjamkan sejumlah uang yang sudah tidak punya nilai lagi.

- 4) Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan, tidak boleh meminjam sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk maksiat.

d. Syarat *iwad* (tujuan) adapun ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Kerelaan kedua belah pihak.
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁷¹

4. Sumber dana *Qardhul Hasan* :

a. Dana komersial atau modal

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek (*short term financing*). Dana ini diperbolehkan diambil dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.⁷² Dalam pasal 617 bagian kedua Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pun menyebutkan sumber dan *qardhul hasan* bersumber dari bagian modal Lembaga

⁷¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 60

⁷² Ma'rifah Yuliani, "Konstruksi Hukum *Qardhul Hasan* dalam Teori dan Praktik Studi Kasus di BMT Berau Syari'ah Kalimantan Timur". (Tesis pada Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016), h. 89 mengutip dari Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), h. 21-22.

Keuangan Syari'ah juga keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan.⁷³

b. Dana sosial

Dana sosial adalah sejumlah dana yang diterima bank syariah dari pihak lain. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah dan hibah. Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong 8 Asnaf yaitu orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), muallaf, budak, orang yang berhutang (gharim), fisabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh (Ibnu Sabil). Dalam pasal 617 bagian kedua Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pun menyebutkan sumber dan *qardhul hasan* bersumber dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyalurannya infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.⁷⁴

c. Dana Non Halal

Dana ini bersumber dari transaksi bank syari'ah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syari'ah.⁷⁵ Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh Bank karena secara prinsip dilarang.

⁷³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku ke II Bagian Kedua tentang Sumber Dana Qardh Pasal 617.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Nur Hasanuddin, Iva Harlianti Sholikha, *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*. *Ziswaf Jurnal zakat dan waqaf*, Vol 1, No. 1, (Juni 2014), h. 14.

Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah* dari Teori ke Praktek menjelaskan di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardhul hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan atau disebut pendapatan non-halal seperti jasa nostro⁷⁶ di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C⁷⁷ di bank asing, dan sebagainya.⁷⁸

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia⁷⁹ telah diatur mengenai sumber dana *qardhul hasan* yakni sebagai berikut:



⁷⁶ Rekening Nostro adalah rekening atau akun valuta asing suatu bank yang ada pada bang korespondennya di luar negeri, akun/rekening nostro tersebut dicatat dalam mata uang negara tempat bank koresponden berada, dengan nilai lawan dollar Amerika Serikat. Bank koresponden adalah Bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan baik dengan bank lain untuk saling memberikan jasa serta melakukan transaksi (transfer, penghitungan dan konversi mata uang) untuk dan atas nama bank yang berkepentingan. "Rekening Nostro: Arti, Makna, Pengertian dan Definisi" (On-line), tersedia di: <https://www.urmilamile.com/rekening-nostro-arti-makna-pengertian-dan-definisi/> (06 April 2018).

⁷⁷ *Letter of Credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antarpulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Pengertian secara umum letter of credit merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). Lihat di Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed. Revisi 10, h. 211.

⁷⁸ Syafi'i Antonio, Loc. Cit.

⁷⁹ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indoensia (IAI), PAPSI, cet. 1, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003) h. XXI-1.

a. Infaq/Shodaqoh

Sumber dana infaq dan shodaqoh dari pihak di luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.

b. Denda

Denda yang dimaksud di sini adalah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan bank.

c. Sumbangan/hibah

Dana sumbangan/hibah yang dimaksud adalah dana yang diterima dari nasabah atas permintaan nasabah dan tanpa paksaan diperuntukkan guna kepentingan sosial.⁸⁰

d. Pendapatan non-halal

Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal berasal dari penerimaan jasa giro⁸¹ dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.

Transaksi dengan sumber dana non halal menjadi bagian dari transaksi antar lembaga keuangan, khususnya karena transaksi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan

⁸⁰ Hendri Hermawan, *Op. Cit*, h. 271.

⁸¹ Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Lihat Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h, 32.

konvensional menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan. Diantara penyebabnya adalah, Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi keuangan di setiap negara, sehingga transaksi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan, sehingga LKS memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional.⁸²

5. Aspek Teknis Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah tanpa meminta tambahan apapun kecuali biaya administrasi. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Penggunaan dana untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat digunakan untuk hal-hal di bawah ini:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang relatif singkat. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah dana yang dipinjamnya itu.

⁸² Oni Sahroni, "Pemasukan Dana non Halal di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam Perspektif Syari'ah". Dipresentasikan pada Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke – 8 (MCSN 8) tentang 'Menangani Cabaran dan Merintis inovasi dalam Kewangan Islam' yang di selenggarakan oleh Internasional Syariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Malaysia pada tanggal 28-29 Mei 2014 di Johor Bahru.

- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk pinjaman untuk membantu usaha kecil atau membantu sektor sosial.⁸³

Motivasi bank syariah mengeluarkan produk *qardul hasan* bukan untuk mengejar keuntungan (komersial) tetapi diorientasikan untuk kepentingan sosial (*social oriented*) yaitu dalam rangka membantu nasabah kecil-menengah melaksanakan kegiatan usahanya. Saat ini, bank syariah memang lebih banyak mengeluarkan produk yang berorientasi pada komersial atau untuk meraih keuntungan dengan memperbanyak produk-produk yang mengacu pada akad jual-beli atau bagi hasil. Sedangkan skema produk *qardul hasan* sangat kecil bahkan ada sebagian bank syariah yang tidak menggunakan produk *qardul hasan*. Pelaksanaan produk *qard al-hasan* diwujudkan dalam bentuk dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat usaha kecil-menengah sebagai wujud keikutsertaannya dalam pengembangan di sektor riil yang dilakukan oleh kelompok kecil & menengah.⁸⁴

⁸³ Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, h. 89

⁸⁴ Hendri Hermawan A. N, *Loc. Cit.*

Aspek teknis pembiayaan *qardhul hasan* dalam perbankan syari'ah dapat diketahui sebagai berikut:

a. Implementasi

Qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

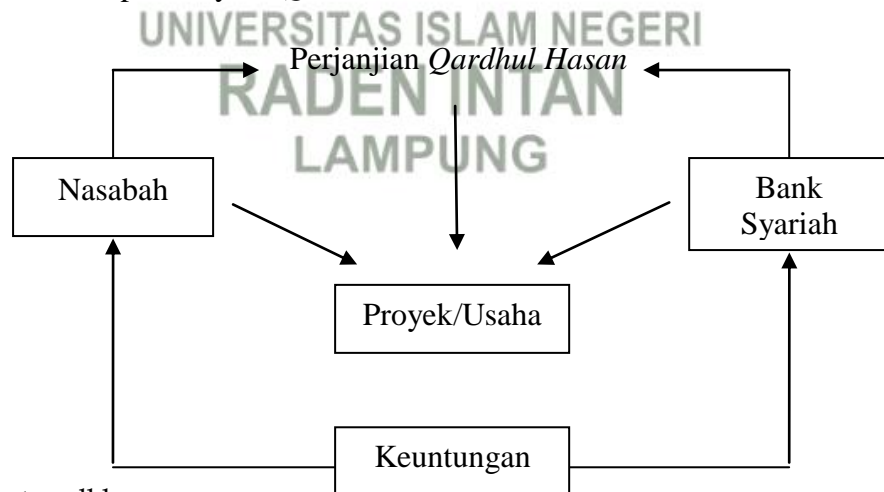
b. Pemberi pinjaman (Bank)

- Bank dapat memberikan pinjaman *qardhul hasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
- Bank dapat membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardhul hasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal biaya tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian/seluruh pinjaman nasabah, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu.

c. Peminjam (nasabah)

- Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardhul hasan* pada waktu yang disepakati.
- Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.
- Adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.
- Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (di luar pinjaman) dari nasabah peminjam *qardhul hasan*.

Skema pembiayaan *Qardhul Hasan*



Sumber: Falihatun dkk.

B. Tinjauan Umum tentang *Maqashid Al-Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Secara etimologis, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari kata *qasd* yang berarti bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampau batas, jalan lurus.⁸⁵ Sedangkan menurut Ibn Manzur (w. 711 H/1317 M) mengartikan *qasd* dengan القصد استقامة الطريق والاعتماد “konsisten dan berpegang teguh pada jalan.”⁸⁶

Berdasarkan berbagai definisi yang beragam di atas, apa yang dikehendaki oleh para *maqasidiyyun* dengan kata *al-maqasid* adalah (arah), (tujuan akhir), (tetap/konsisten), (adil), (sikap pertengahan), (sesuatu yang dituju di balik perbuatan), dan (tujuan dari hukum-hukum Islam).⁸⁷

Sedangkan unsur kedua adalah kata *syari'ah*. Kata ini berasal dari يشرع yang berarti “jalan menuju mata air”, kebiasaan atau sunnah, jalan, secara etimologis berarti *al-tariqah*, yaitu jalan yang ditempuh menuju sumber air untuk diminum. Menurut ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M) secara terminologis, kata *al-syari'ah* dimaknai “jalan yang lurus dan aturan hukum yang diridhai Allah bagi

⁸⁵ Sayyid Agil al-Munawwar, *Maqashid al-Syari'ah*, h. 43 mengutip dari Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), h. 396.

⁸⁶ *Ibid*, h. 42 mengutip dari Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol, 3, (Beirut: Dar Sadir, t.th), h. 353.

⁸⁷ *Ibid*, mengutip dari Muhammad al-Tahir Ibn' Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, ed. Muhammad al-Tahir al-Misawi, (Kuala Lumpur: al-Fajr, 2001), h. 183.

hambaNya”. Al-Raysuni mengatakan bahwa shari’ah bermakna “ketentuan hukum Islam yang bersifat praktis dalam bentuk konsepsi akidah, legislasi, akhlak maupun muamalah.”⁸⁸ Dalam konteks fikih, *syari’ah* diartikan “hukum-hukum yang disyari’atkan Allah untuk hambaNya baik berupa ketentuan yang bersumber dari al-Qur’an atau Sunnah”.⁸⁹

Dengan demikian, *maqasid al-syari’ah* memiliki beragam padanan kata. Ulama ushul fiqh, al-Shatibi, sering menggunakan beberapa istilah kata *maqasid al-syari’ah* (tujuan-tujuan hukum),⁹⁰ *al-maqasid al-shar’iyyah fi al-syari’ah* (tujuan hukum yang terdapat dalam hukum syari’at),⁹¹ *maqasid min shar’ al-hukm* (tujuan disyari’atkannya hukum Islam). Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur mengartikan bahwa *maqashid al-syari’ah* adalah “maksud dan hikmah yang dikehendaki pembuat syari’at dalam segala ketentuan syari’at-Nya untuk menunjukkan keunggulan (magnimity) hukum-hukum syari’at yang tidak ditampakkan pada kasus-

⁸⁸ *Ibid*, mengutip dari Abd al-Wahab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Quwaytiyyah, 1968), h. 32.

⁸⁹ *Ibid*, mengutip dari Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago, 1979), h. 108.

⁹⁰ *Ibid*, mengutip dari Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, vol. 1, ed.. Muhammad al-Khadar Husein al-Tullisi (ttp: Dar al-Fikr, t.th), h. 4-5.

⁹¹ *Ibid.*, h. 7. Di kalangan para ulama usul al-fiqh lainnya, *maqasid al-shari’ah* juga dipahami dengan asrar al-shari’ah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syari’at berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. misalnya, syari’at mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah (hifz al-din), disyari’atkan hukuman bagi pelaku zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan (hifz an-nasl), disyari’atkan hukum tentang larangan pencurian untuk memelihara harta seseorang (hifz al-mal), disyari’atkan hukuman tentang qisas untuk memelihara jiwa seseorang (hifz an-nafs). Maka dari itu, *maqasid al-shari’ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

kasus hukum tertentu.⁹² Menurut Ahmad al-Raysuni, *maqasid al-syari'ah* adalah “tujuan yang selalu menempel pada hukum syari'at untuk kemaslahatan manusia”.⁹³

Berdasarkan berbagai definisi di atas, Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi menggarisbawahi beberapa komponen dasar yang harus ada dalam *maqashid al-shari'ah* yaitu: (1) harus mengandung tujuan dan rahasia yang hendak dicapai; (2) hukum syari'at; (3) semua tujuan dan rahasia yang dikehendaki harus bermuara pada nilai ketaatan atau *'ubudiyyah* kepada Allah; (4) tujuan dan rahasia itu berupa masalah bagi manusia di dunia dan akhirat.⁹⁴

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. *Maqashid Syariah* merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli hukum Islam menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid. Inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid*, mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah *maslahah* (maslahat). Dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun,

⁹² *Ibid*, mengutip dari 'Allal al-Fasi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Beirut: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1963), h. 51.

⁹³ *Ibid*, mengutip dari Ahmad al-Raysuni, *Nazriyyat al-Maqasid 'inda al-Shatibi*, (t.t: Matba'ah al-Najah al-Jadidah, 1991), h. 7.

⁹⁴ *Ibid*, mengutip dari Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi, *Abhath fi Maqasid al-Shari'ah*, 14.

sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya.⁹⁵

Al-Juwaini oleh para Ushûliyyin kontemporer dianggap sebagai ahli *ushûl al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhân fî Ushûl al-Ahkâm* beliau mengembangkan kajian *Maqâshid al-Syarî'ah* dengan mengelaborasi kajian *'illat* dalam *qiyâs*. Menurutnyanya *asal* yang menjadi dasar *'illat* dibagi menjadi tiga; yaitu: *Dlarûriyyât*, *Hâjiyyât* dan *Makramât* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsîniyyât*.

Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H). Lewat karya-karyanya; *Syifâ al-Ghalîl*, *al-Mushthafâ min 'Ilmi al-Ushûl* beliau merinci maslahat sebagai inti dari *maqâshid al-syarî'ah* menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima maslahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas maslahat tersebut. Oleh karena itu beliau membedakanya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *dlarûriyyât*, *hajiyyât* dan *tahsiniyyât*.

⁹⁵ Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah*. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), h. 231.

Ahli *ushûl al-fiqh* selanjutnya yang membahas secara spesifik *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah 'Izzu al-Dîn bin 'Abdi al-Salâm tokoh *ushûl* bermadhab Syafi'i. Melalui karyanya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, beliau telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep *Dar'u al-Mafâsid wa Jalbu al-Manâfi'* (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfa'at). Baginya maslahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tatimmât*.

Adapun ahli *ushûl al-fiqh* yang membahas konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishâq al-Syâthibi (w 790 H) pada pertengahan abad ke-7, dari kalangan madhab Maliki. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwâfaqât* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklîf* dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tatimmât* atau *tahsîniyyât*.⁹⁶ *Maqashid* dalam kategori ini diorientasikan untuk membantu manusia dalam mencapai

⁹⁶Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3 Agustus, (Banda Aceh 2017), h. 553-554.

segala urusan yang dihadapi baik untuk jangka pendek (dunia) maupun jangka panjang (akhirat).

2. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

a. *Maqashid Syari'ah* Dari Segi Kekuatan Hukum

Berdasarkan segi kekuatan hukum, para maqasidiyyun membagi *maqashid syari'ah* menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Al-Maqasid Al-Qat'iyyah*, adalah jenis maqasid yang secara *qat'i* dan *mutawatir* telah disebutkan dalam al-Qur'an atau hadis sehingga menjadi pengetahuan yang yakin (*fi al-dhin al-yaqin*) bahwa maksud yang termaktub dalam nash dalam banyak yang banyak adalah apa yang dikehendaki syar'i, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*⁹⁷

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 28.

Dan surat al-Hajj ayat 78:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*⁹⁸

Ini menunjukkan bahwa *maqashid* dari kedua ayat tersebut adalah menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*) meskipun tanpa melalui penelitian yang mendalam.

- 2) *Al-Maqasid Al-Zanniyyah*. yaitu maksud syari'at yang termaktub dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun hadis akan tetapi tidak sampai pada derajat *mutawatir* dan bisa digali melalui pencarian '*illah* atau *istiqra*'. Contoh *maqashid* kategori ini adalah ketika Allah melarang adanya monopoli dan menimbun harta, maka Allah mensyari'atkan adanya jual beli, mempermudah akad jual beli, perintah menafkahkan sebagian harta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “agar supaya tidak ada sentralitas peredaran kekayaan pada kelompok tertentu” adalah sebagai maksud (*maqashid*) dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan harta dan kekayaan. Karena penyebutan maksud dalam beberapa perintah di atas tidak secara jelas, maka *maqashid* yang terkandung bersifat zann

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 341.

(dugaan). Akan tetapi para *maqashidiyyun* sepakat bahwa status zann yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang cukup dianggap sebagai hal yang bisa diterima sebagai bentuk pemahaman terhadap hukum Islam dan beristinbath melalui proses ijtihad.

- 3) *Al-Maqasid Al-Wahmiyyah*, adalah pencarian maksud syari'at melalui akal atau sering disebut dengan *maqashid* ilusif. Selain tidak ada ketentuan yang jelas dalam nash bahkan bertentangan dengan kehendak nash, *maqashid* kategori ini juga digali melalui prinsip *al-taysir* (kemudahan) yang berlebihan sehingga nilai bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya. Contoh, mengambil nilai manfaat atau maslahah dari khamr dan memperbolehkan meminum khamr untuk menghangatkan badan. Penetapan maslahah semacam ini di samping bertentangan dengan akal sehat juga sangat bertolak belakang dari maksud nash, sehingga para ulama *maqashidiyyun* sepakat tidak bisa menerimanya sebagai dasar dalam hukum Islam.

b. *Maqashid Syari'ah* dari Segi Orientasi atau Objek

Dalam hukum syari'at, ada banyak ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan semua sendi kehidupan manusia yang bersifat hirarki. Sama halnya dalam menentukan orientasi masalah dalam hukum Islam juga terdapat hirarki yang sekaligus menunjukkan skala prioritas. Dari segi orientasi atau objek, 'Abd Majid al-Najjar membaginya menjadi tiga, yaitu:

1) *Al-Maqashid Al-Kulliyyah*, adalah *maqashid* yang memiliki cakupan masalah dalam skala makro sehingga untuk merealisasikannya memerlukan upaya keras dan berkesinambungan dari skop yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Contohnya adalah *maqashid* dari merealisasikan sistem pemerintahan di muka bumi, prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan, tujuan menjada institusi umat. Dengan merealisasikan tujuan syari'at secara makro (*kulliyyah*), menurut 'Allal al-Fasi, maka secara otomatis telah menjaga dan merealisasikan tujuan syari'at secara mikro (*juz'iyah*).

2) *Al-Maqashid Al-Naw'iyah*, adalah sejumlah ketentuan hukum syari'at yang dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan, seperti sejumlah ketentuan hukum syari'at yang berhubungan dengan hukum keluarga bertujuan untuk semakin memperkuat dan

menjaga ikatan kekeluargaan. Contoh lain adalah sekumpulan hukum Islam yang berhubungan dengan *al-Mu'amalat al-maliyyah* adalah dimaksudkan untuk merealisasikan hifz al-mal (menjaga harta). *Al-maqashid al-naw'iyah* juga sering disebut dengan *al-maqashid al-khassah*.

- 3) *Al-Maqashid Al-Juziyyah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui satu ketentuan hukum secara khusus. Contoh, tujuan dari perintah wudhu adalah untuk mensucikan. Tujuan ini secara langsung dinyatakan dalam satu tempat (ayat) dengan melakukan suatu perintah tertentu, seperti dalam surat al-Maidah ayat 6:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ ... ﴿٦﴾

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu.*⁹⁹

Contoh lain adalah larangan melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh orang lain. Larangan ini bertujuan supaya tidak ada permusuhan dengan saudara seiman atau dengan orang lain.

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 108.

c. *Maqashid Syari'ah* Dari Segi Cakupan

Para pakar *maqashidiyyun* kontemporer mencoba untuk memberikan rumusan klasifikasi teori *maqashid* dengan memberi ruang-ruang baru pada dimensi yang memiliki cakupan lebih luas. Klasifikasi kontemporer yang dirumuskan para sarjana hukum Islam adalah:

- 1) *Al-Maqashid Al-'Ammah* (Tujuan Yang Bersifat Umum), *maqashid* ini digali melalui kompleksitas bangunan hukum Islam dengan menambahkan nilai-nilai baru pada ranah *daruriyyah* dan *hajiyyah* seperti keadilan dan kebebasan. Ibn 'Ashur memaknai *al-maqashid al-'ammah* dengan menjaga perintah Tuhan, mencari masalah dan menolak bahaya (*jalb al-mashalil wa dar' al-mafashid*), membangun persamaan derajat antara sesama manusia, menghargai hukum yang berlaku, dan mendorong demi terciptanya kemajuan untuk manusia (*human development*).

- 2) *Al-Maqashid Al-Khassah* (Tujuan Khusus), *maqashid* ini digali melalui bahasan tertentu dalam hukum Islam, seperti kesejahteraan bagi anak-anak dalam hukum keluarga, melakukan upaya preventif dalam wilayah hukum pidana, dan

menjaga adanya monopoli orang atau kelompok tertentu dalam hukum transaksi.

- 3) *Al-Maqashid Al-Juziyyah* (Tujuan Parsial), *Maqashid* yang berkaitan dengan maksud atau hikmah di balik ketetapan suatu hukum atau ‘*Allal al-fasi*’ mengartikannya dengan rahasia-rahasia yang ada pada setiap ketentuan hukum, seperti menemukan kebenaran sebagai hikmah dari perintah untuk mendatangkan saksi dalam persidangan, memberikan *rukhsah* (keringanan) adalah hikmah dari kebolehan membatalkan puasa bagi orang yang sakit, memberi makan fakir miskin sebagai hikmah dari larangan menyimpan daging qurban.

d. *Maqashid Syari’ah* Dari Segi Orisinalitas

Berdasarkan segi orisinalitas, para *maqasidiyyun* membagi masalah menjadi dua yakni:

1) *Maqashid Al-Usul*

Adalah tujuan dasar yang ingin dicapai oleh ketentuan hukum Islam itu sendiri, yaitu berupa *al-daruriyyat al-khams* yang meliputi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta). Di samping itu, ada juga prinsip-prinsip dasar yang secara otomatis menempel pada

hukum Islam itu sendiri, seperti keadilan (*al-'adalah*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaana derajat (*al-musawah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), dan kebaikan untuk manusia (*masalih al-'ibad*).

- 2) *Maqashid Al-Wasail*, adalah berupa sarana untuk mencapai tujuan yang bersifat dasar atau fundamental (*maqashid al-usul*). Imam al-Shatibi mengistilahkan poin kedua ini dengan *maqashid al-tabi'i*. Artinya, untuk mencapai tujuan yang bersifat dasar (*maqashid al-usul*), maka harus melalui sarana tertentu dan sarana yang dimaksud adalah *maqashid al-wasail*.

e. *Maqashid Al-Syari'ah* Dari Segi Kekuatan Masalah

Maqashid dalam kategori ini diorientasikan untuk membantu manusia dalam mencapai segala urusan yang dihadapi baik untuk jangka pendek (dunia) maupun jangka panjang (akhirat). Berdasarkan kekuatan dan cakupannya, ada beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki hirarki yang berbeda. Sebagai contoh, nilai masalah dari adanya larangan mencuri adalah sebagai bentuk realisasi *hifz al-mal* dan memiliki kedudukan lebih kuat dibanding nilai masalah dari kebolehan transaksi jual beli baik dalam skala mikro maupun makro. Dari perspektif kekuatan masalah para *maqashidiyyun* membagi tiga bagian, yaitu:

1) *Al-maqashid al-daruriyyah*, untuk menunjukkan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan umat manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Shatibi dan Ibn ‘Ashur, *al-maqashid al-daruriyyah* harus terealisasi, karena jika tidak, semangat hukum Islam yang seharusnya memberikan jaminan keselamatan manusia di dunia dan akhirat akan mengalami kegagalan.¹⁰⁰ Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, **pertama**, dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. **Kedua**, dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

¹⁰⁰ Ibid, h. 55 lihat Ahsan Lihassanah, *al-Fiqh al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Shatibi wa atharuh ‘ala Mahabith Usul al-Tashri’ al-Islami*, 19

- 2) *Al-maqashid al-hajiyyah*, adalah kebutuhan sekunder. Al-Shatibi mengatakan bahwa jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Semangat dasar syari'at Islam adalah menghilangkan segala kesulitan tersebut.¹⁰¹ Adnan M. Umamah menambahkan *hajiyyah* adalah untuk memberikan keluasaan kepada manusia keluar dari kesulitan dan kesempitan. Sebagai contoh, dengan adanya hukum rukhsah (keringanan), seperti dijelaskan Abdul Wahab Khallaf, adalah contoh perhatian syari'at Islam terhadap orang yang berada dalam kondisi kesulitan. Contoh lain adalah pembolehan tidak berpuasa bagi musafir.
- 3) *Al-Maqashid al-tahsiniyyah*, adalah kebutuhan tersier. Menurut Imam al-Ghazali, tahsiniyyah adalah kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khams*) dan tidak pula menimbulkan kesulitan pada *hajiyyah* apabila tidak terpenuhi, akan tetapi ia hanya merupakan pelengkap, memperindah, mempermudah kaitannya dengan kebiasaan setempat dalam konteks mu'amalah.¹⁰² Senada dengan Imam al-Ghazali, al-Shatibi

¹⁰¹ Ibid, h. 57 lihat Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, vol. 2, 226

¹⁰² Sayyid Agil Munawwar, *Loc. Cit.*

memaknai *tahsiniyyah* “kepatutan menurut adat-istiadat, menghindari hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah mu’amalah dan ‘*uqubah*”. Contoh *tahsiniyyah* adalah anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan menyiksa mayat dalam peperangan dan sebagainya.

C. Konsep Halal dan Haram dalam Islam

Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “Halal dan Haram dalam Islam” menjelaskan bahwa niat baik tidak dapat melepaskan yang haram. Islam memberikan penghargaan terhadap setiap hal yang dapat mendorong untuk berbuat baik, tujuan yang mulia dan niat yang bagus, baik dalam perundang-undangannya maupun dalam seluruh pengarahannya. Niat yang baik itu menggunakan seluruh yang mubah dan adat untuk berbakti dan *taqarrub* kepada Allah. Oleh karena itu siapa yang makan dengan niat untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan memperkuat tubuh supaya dapat melaksanakan kewajibannya untuk berkhidmat kepada Allah dan umatNya, maka makan dan minumannya itu dapat dinilai sebagai ibadah dan *qurbah*.

Adapun masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal

itu tidak dibenarkan dalam Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam selamanya menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syari'at Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-Ghayah tubirrul wasilah* (tujuan menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan *al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh suatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebathilan).

Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya harus dihapus. Haram dalam syari'at Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.¹⁰³ Nabi Muhammad SAW bersabda;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الصَّبَّاحِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْثَةِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ
بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا

¹⁰³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), h. 37.

يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ
 أَحَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَا
 يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بِوَائِقِهِ قَالُوا وَمَا بِوَائِقِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ غَشْمُهُ
 وَظُلْمُهُ وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ وَلَا
 يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ
 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ
 بِالْحَسَنِ إِنَّ الْحَبِيثَ لَا يَمْحُو الْحَبِيثَ¹⁰⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Aban bin Ishaq dari Ash Shabah bin Muhammad dari Murrah Al Hamdani dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah membagikan akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagikan rizki di antara kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai maupun tidak, sedangkan Dia memberikan agama hanya kepada yang Dia cintai, barangsiapa yang diberi agama oleh Allah, maka Dia telah mencintainya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, seorang hamba tidak akan selamat hingga hati dan lisannya selamat, dan tidak beriman seseorang hingga tetangganya merasa aman dari kejahatannya." Mereka bertanya; Apakah kejahatannya itu wahai Nabiullah? Beliau menjawab: "Menganiaya dan menzhaliminya. Dan tidaklah seorang hamba mencari harta yang haram lalu membelanjakannya lantas ia diberkahinya dan tidaklah bersedekah lantas diterima darinya dan tidaklah ia meninggalkan di belakang punggungnya melainkan akan menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menghapus keburukan akan tetapi menghapus keburukan

¹⁰⁴ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: 'Alimul Kutub, 1998 M), h. 387.

dengan kebaikan, sesungguhnya keharaman tidak dapat menghilangkan keharaman pula."

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا
وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {وَقَالَ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ
السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ قَالَ
أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ
بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ
الْأَشْجَعِيَّةَ¹⁰⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq dari Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu

¹⁰⁵ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar El Fikr, 2005 M), h. 849.

'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul, Dia berfirman: "Wahai para rasul, Makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang Ku berikan padamu." Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdo'a; "Ya Rabb, ya Rabb, " sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan do'anya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib. Kami hanya mengetahuinya dari hadits Fudlail bin Marzuq. Abu Hazim adalah Al Asyja'i, namanya adalah Salman, bekas budak 'Azzah Al Asyja'i.

Pada hadis di atas menunjukkan bahwa ketidakbolehan mencampur adukkan yang halal dengan yang haram walaupun tujuannya untuk kebaikan. Namun, jika dilihat dari konteks realita zaman sekarang, seperti akad *qardhul hasan* menjadi sesuatu yang sangat membantu perekonomian rakyat kecil. Setiap pedagang kecil yang tak memiliki dana untuk mengembangkan usahanya, orang miskin, nasabah yang membutuhkan dana talangan jangka pendek, dapat meminjam pada bank syari'ah tanpa adanya tambahan saat pengembalian dan bahkan jika terjadi *force majeure* atau sesuatu diluar kuasa manusia, dana pinjaman tersebut tidak apa jika tidak dikembalikan. Maka, *qardhul hasan* merupakan sebuah solusi untuk memberikan kemaslahatan bagi umat muslim khususnya yang berkekurangan. Namun, fakta halal atau haramnya pun masih meragukan.

BAB III

DANA NON HALAL DALAM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*

D. Gambaran Umum tentang Dana Non Halal

1. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syari'ah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syari'ah.¹⁰⁶ Dana non halal ini juga sering disebut dengan dana atau pendapatan yang meragukan. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh bank karena secara prinsip dilarang. Namun, hal tersebut tidak dapat dihindari karena bank syari'ah masih tidak dapat terlepas dari bank konvensional.

Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya pembiayaan *qardhul hasan*, dana atau pendapatan non halal adalah dana yang berasal dari penerimaan jasa giro dari perbankan konvensional,¹⁰⁷ atau *income* lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank syariah.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Nur Hasanuddin, Iva Harlianti Sholikha, *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Ziswaf Jurnal zakat dan waqaf, Vol 1, No. 1, (Juni 2014), h. 14.

¹⁰⁷ Solehudin, dkk, *Ahsankah Pendapatan Non Halal pada Qardhul Hasan?*. SNAS, (2014), h. 68.

¹⁰⁸ Ana Kadarningsih, dkk, *Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol VII, No. 1: 32-41 (Juni 2017/1438 H), h. 38.

Sumber dana kebajikan yang berasal dari pendapatan non halal biasanya berasal dari transaksi dengan bank konvensional. Dalam PSAK No. 101 dijelaskan pendapatan non halal antara lain adalah penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro, atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional yang dana ditempatkan di sana untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasional bank. Bank syariah tidak diperkenankan untuk menjadikan penerimaan non halal atau bunga dari bank konvensional ditempatkan pada kolom pemasukan bank.¹⁰⁹

2. Kriteria Harta Non Halal

Sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu apa saja kriteria sebuah harta non halal itu. Seperti yang dikemukakan oleh Oni Syahroni¹¹⁰ bahwa harta non halal itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Harta yang haram karena dzatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukan, daging babi, dll.
- b. Setiap asset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*), usaha yang tidak halal seperti : pinjaman

¹⁰⁹Rasya Fadilla Balangger, dkk *Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada Laporan Keuangan Bank BRI Syari'ah Cabang Manado*. Jurnal EMBA, Vol 5, No. 2 (Juni 1962H/ 2017), h. 1962.

¹¹⁰ Dipresentasikan pada Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke – 8 (MCSN 8) tentang 'Menangani Cabaran dan Merintis inovasi dalam Kewangan Islam' yang di selenggarakan oleh Internasional Syariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Malaysia pada tanggal 28-29 Mei di Johor Bahru.

berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dll.¹¹¹

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram/diharamkan, yang pertama karena dzatnya, dan yang kedua karena bersumber dari usaha yang tidak halal. Dalam praktiknya, dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito, itu tidak mungkin berupa harta haram karena dzatnya.¹¹² Namun atas setiap usaha yang dihasilkan oleh perbankan syari'ah bisa saja menghasilkan dana non halal karena pada dasarnya perbankan syari'ah masih dalam tahap perkembangan yang belum bisa lepas dari hubungan dengan perbankan konvensional.

Oleh karena sangat penting untuk mengetahui kegiatan-kegiatan usaha yang tidak dibolehkan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu :¹¹³

- a. Usaha Lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.

¹¹¹ *Ibid*, h. 2. Mengutip dari *Mushtalahat al-fiqhi al-mali al-mu'ashir*, tim IIIT, h. 62.

¹¹² *Ibid*, h. 3.

¹¹³ *Ibid*, h. 4. Mengutip dari *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Revisi,, (Jakarta: 2006) diterbitkan atas kerja sama DSN-Bank Indonesia, h. 274.

- b. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Karena kedua hal di atas termasuk aktifitas ribawi yang diharamkan dalam nash, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُحَيْمِرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ¹¹⁴

Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

- c. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang, karena termasuk *maisir* /judi yang dilarang dalam islam
- d. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- e. Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.

¹¹⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim Kitab Al-Musaqat Bab La'ni Aakilir Riba wa Mu'kilihi*, hadist no. 2995, h. 697.

Hal ini pula sesuai dengan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹⁵

3. Hukum harta non halal

Setiap pendapatan dari usaha-usaha sebagaimana yang telah disebutkan di atas itu diharamkan. Pendapatan yang dimaksud adalah :

- a. Bunga atas transaksi pinjaman
- b. Pendapatan dari usaha yang aktifitas pinjaman berbunga lebih dominan
- c. Pendapatan dari usaha perjudian, minuman keras, barang merusak moral dan mudharat

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 83.

Pendapatan tersebut tidak boleh dijadikan modal usaha / bisnis, sesuai dengan penjelasan Standar Syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut:

لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالْعِصْرِ الْمَحْرَمِ الْوَاجِبُ التَّخْلِصُ مِنْهُ بِأَيِّ وَجْهِ وَجُوهُ
الْإِنْتِفَاعِ وَلَا التَّحَايِلُ عَلَى ذَلِكَ¹¹⁶

Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah ribawiyah.

Namun dalam hal ini, Syaikh al-Qardhawi dan Prof. Qurrah berpendapat bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pendapat bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya namun tetap halal bagi penerimanya.¹¹⁷

4. Hukum Dana Halal Bercampur dengan Dana Non Halal

¹¹⁶*Al-Ma'ayirashi Syar'iyyah* No. 21 tentang Saham, *Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah*, (Bahrain, 2010), h. 293.

¹¹⁷Ma'rifah Yuliani, "Konstruksi Hukum *Qardhul Hasan* dalam Teori dan Praktik Studi Kasus di BMT Berau Syari'ah Kalimantan Timur". (Tesis pada Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016), h. 103 mengutip dari Oni Sahroni dan Adiwarman Azwar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 225.

Mengenai hukum dana halal jika bercampur dengan dana non halal terdapat dua pendapat. **Pendapat pertama**, menyatakan bahwa percampuran tersebut tetaplah hukumnya haram. Salah satu kaidah fiqih menjelaskan bahwa jika ada dana halal dan haram dicampur maka hukumnya tetaplah haram adalah sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ¹¹⁸

Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.

Contoh penerapan kaidah ini, jika ada opsi hukum halal dan haram, maka hukum haram yang lebih diunggulkan. Begitu pula, jika ada dalil yang menunjukkan hukum haram dan dalil yang menunjukkan hukum mubah, maka yg dipilih adalah dalil yang menunjukkan hukum haram.

قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ :
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحُرِّمَتْهُمَا آيَةٌ وَالتَّحْرِيمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا قَالَ الْأَيْمَنَةُ : وَإِنَّمَا
كَانَ التَّحْرِيمُ أَحَبَّ لَأَنَّ فِيهِ تَرَكَ مُبَاحٍ لِاجْتِنَابِ مُحَرَّمٍ وَذَلِكَ أَوْلَى
مِنْ عَكْسِهِ¹¹⁹

¹¹⁸ As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, *Al-Asybah wa An-Nadzair Fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Muhaqqiq; Markas Kajian dan Pembahasan di Maktabah Nazzar al-Baz , Cetakan kedua (Mekah-Riyadh: Maktabah Nazzar al-Bazz, 1997), h.174.

¹¹⁹ Ibid, h. 12. Mengutip dari as-Suyuthi, *al-Mantsur fi al-Qawa'id al-fiqhiyah*, 1/133, *al-Asybah wa an-Nadzair*, h.. 106.

Sahabat Utsman r.a ketika ditanya tenga dua orang wanita bersaudara karena sebab milkil yamin, beliau menjawab : satu ayat membolehkan, dan ayat lain mengharamkan. Dan hukum haram lebih dicintai Allah Swt.

Contoh penerapan kaidah ini, jika uang dirham yang halal bercampur dengan dirham yang haram dan tidak bisa dipisahkan, maka caranya, kadar haram dipisahkan, kemudian sisanya diambil. Jika bagian yang dipisahkan itu diketahui pemiliknya, maka bagian itu diserahkan kepadanya. Jika tidak diketahui, maka disedekahkan kepada yang lain.¹²⁰

Jika pendapat ini diterapkan dalam permasalahan ini, maka dana halal yang bercampur dengan dana non halal hukumnya haram.

Sedangkan **pendapat kedua**, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa jika pendapatan halal lebih dominan daripada pendapatan non halal, maka hal tersebut diperbolehkan. (24) Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan,

لَا أَكْثَرَ حُكْمِ الْكُلِّ¹²¹

Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan.

¹²⁰ Loc. Cit, Mengutip dari *al-Musahamah fi asy-syarikat tata'amalu bi al-fawa'id ar-ribawiyah*, Abdu as-Sattar abu guddah, al-haiah asy-syar'iyah li al-barakah, Majmuatu dallah al-baraka, jeddah, cet. II 2003 hal. 306

¹²¹ Ibid, h. 13. Mengutip dari *al-Jauharah an-Nirah*, al-Hidadi al-'Ibadi, 1/303, *Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam*, Ali haidar, 1/183

Menurut mayoritas ulama, yang menjadi standar, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka dipilih adalah dana yang lebih dominan, karena hukum mayoritas seperti hukum keseluruhan.

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya:

Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut :

قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيُّ : أَمَّا مَسْأَلَةٌ مَا إِذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَمِ فِي
الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَالْأَخْذُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنَ
الْحَرَامِ¹²²

Ibnu Nujaim al-Hanafi menjelaskan : jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan di ambil kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.

An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

وَقَالَ النَّوَوِيُّ : اخْتَلَطُ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لَا يَنْحَصِرُ بِحَلَالٍ يَنْحَصِرُ لَمْ
يَحْرُمِ الشِّرَاءُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَفْتَرَنَ بِتِلْكَ الْعَيْنِ عَلَامَةٌ

¹²² Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nadzair*, h. 345.

تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْحَرَامِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَ لَكِنْ تَرَكَهُ وَرَعٌ

مَحْبُوبٌ وَ كُلَّمَا كَثُرَ الْحَرَامُ ثُبُتَ الْوَرَعُ¹²³

Imam nawawi berkata : jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas , maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram.

E. Penggunaan Dana Non Halal dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Penggunaan dana non halal dalam sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah tidak dapat dihindari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerimaan non halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.¹²⁴ Dana non halal ini biasanya dialokasikan sebagai dana kebajikan dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*.

Beberapa contoh penggunaan dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* di beberapa bank adalah sebagai berikut.

1. Dana non halal dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT Bank Muamalat Indonesia

¹²³ Abi Zakariya al-Anshari, *al-Majmu; Syarhu al-Muhadzdzab, al-Mathba'ah al-Muniriya*, h. 418, lihat juga Az-Zarkasyi, *al-Bahru al-Muhith*, 1/324.

¹²⁴ Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia BPRS Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan. h. 16.2 (2013)

PT Bank Muamalat Indonesia menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* yang salah satu sumber dananya berasal dari pendapatan non halal.¹²⁵ Produk pinjaman *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia diperuntukkan pada hal-hal berikut:¹²⁶

- a. Sebagai pinjaman talangan haji di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke tanah suci;
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang telah ditentukan;
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil;
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya

¹²⁵ Muhammad Imam Purwadi, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syari'ah*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1. Vol. 21 (Januari, 2014), h. 24.

¹²⁶ *Ibid*, h. 37.

kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya;

- e. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya;
- f. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito; dan
- g. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Pada Bank Muamalat tersebut, program CSR dilakukan melalui salah satu produk pembiayaan, yaitu produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai wujud misi sosial perbankan syariah. Pelaksanaan kegiatan sosial tersebut bersumber dari dana ZIS (*Zakat, Infaq, Shodaqoh*) Bank Muamalat, karyawan dan nasabah, dana CSR, dan dana sosial lainnya, serta dana non halal yang diterima Bank Muamalat seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional. Selama tahun 2010 telah disalurkan dana CSR sebesar Rp. 22.800.000.000,00 dari total dana penerimaan untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 27.700.000.000,00. Adapun selama 2011, Bank Muamalat telah menyalurkan dana CSR sebesar

Rp.11.600.000.000,00 dari total penerimaan sebesar Rp. 32.500.000.000,00.¹²⁷

Berdasarkan pelaksanaan produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) tersebut, diketahui bahwa produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* merupakan salah satu “ciri pembeda” bank syariah dengan bank konvensional. Dalam produk ini terkandung *misi sosial kemasyarakatan* sebagai wujud tanggung jawab sosial PT. BMI kepada masyarakat. *Misi sosial kemasyarakatan* ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹²⁸

2. Dana non halal dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Aplikasi sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal pada perbankan syariah berasal dari penerimaan jasa giro dari bank at Cabang DIY. Dengan demikian Bank BRI Syariah Yogyakarta terkadang mendapat keuntungan berupa bunga yang dialokasikan kepada konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. Dikarenakan Bank BRI Syariah Yogyakarta termasuk dalam kategori Unit Usaha Syariah yang

¹²⁷ *Ibid*, h. 39.

¹²⁸ Muhammad Imam Purwadi, *Loc. Cit.*

mana manajemennya berada pada naungan PT. Bank BRI Persero sehingga bila terjadi kelebihan dana (*surplus money*) atau kekurangan dana (*defisit money*) maka Bank BRI Syariah melakukan subsidi silang dengan Bank BRI Konvensional. Post pendapatan non halal dan dana tersebut didistribusikan sebagai dana *qard & qardul hasan*.¹²⁹

Dana *qard & qardul hasan* tidak masuk dalam laporan neraca karena dana tersebut termasuk dalam pembiayaan atau pendanaan yang digunakan oleh suatu perusahaan yang tidak menunjukkan kewajiban pada neraca perusahaan tersebut (*off balance sheet financing*). Dana *qardul hasan* yang berhasil terkumpul dari tahun 2004 hingga tahun 2008 ialah sebesar Rp. 10.730.899.-, jadi penghimpunan dana *qardul hasan*/tahunnya ialah Rp. 2.682.725.- dan dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2007-2008 Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum mengeluarkan atau mendistribusikan dana *qardul hasan* karena Bank BRI Syariah sudah memiliki lembaga tersendiri yang khusus menangani dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sehingga dana *qardul hasan* hanya mengandalkan dari denda nasabah dan pendapatan non halal.¹³⁰

¹²⁹ Hendri Hermawan A. N, Sumber dan Penggunaan Dana Qardh dan *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Vol. II, No. 2 (Desember, 2008), h. 271.

¹³⁰ Hendri Hermawan, *Loc. Cit.*

Alokasi pendistribusian dana *qardhul hasan* pada bank syariah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai syariah, sebagai dana bergulir untuk aktivitas sosial sesuai dengan fungsinya. Untuk pemberdayaan sumber daya insani, bank syariah juga menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan modal usaha mikro dan sumbangan biaya pendidikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya sesuai dengan kriteria dan kebijakan masing-masing bank syariah. Sebagai contoh konkret, pada akhir tahun 2012 dana kebajikan yang berhasil terkumpul di perbankan syariah digunakan untuk pelatihan usaha/bisnis *online* bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), khitan masal, pengobatan gratis, pemberian santunan kepada para *huffadz*, pelaksanaan seminar “*take over* pembiayaan ke bank syariah, tabungan syariah”, sebagai implementasi dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mana semua event tersebut bekerjasama dengan Manajemen Masjid Bank Indonesia.¹³¹

3. Dana non halal dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah Cabang Tanjung Karang

¹³¹Ana Kadarningsih, dkk, *Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia, Vol. VII, No. 1 (Juni 2017), h. 38.

BNI Syariah KC Tanjung Karang telah memberikan dana *qardhul hasan* ini kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan, akan tetapi peminjam harus mengembalikan dana tersebut sebagaimana mestinya dalam perjanjian tersebut. Tujuannya untuk melatih rasa tanggungjawab peminjam. Dalam hal ini BNI Syariah KC Tanjung Karang memberikan kelapangan untuk meminjamkan dana yang terdapat dalam produk *qardh* yang bersifat *non profit*. Sumber dana pinjaman *qardhul hasan* ini didapat dari nasabah, masyarakat dan karyawan yang membayar zakat, menyalurkan infak, dan sedekah melalui BNI Syariah KC Tanjung Karang. Selanjutnya dana *qardhul hasan* diperoleh dari dana pendapatan non halal yang diperoleh BNI Syariah KC Tanjung Karang. Dana pendapatan non halal merupakan pendapatan atau bunga yang diperoleh BNI Syariah KC Tanjung Karang dari penerimaan jasa giro dan dari nasabah berupa denda. Denda disini ialah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan BNI Syariah KC Tanjung Karang, seperti terlambat atau tidak melunasi pinjaman. Perolehan dana non halal tidak perlu dilaporkan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang pada Bank Indonesia. Sehingga penggunaan pendapatan non halal merupakan kebijaksanaan BNI Syariah KC Tanjung Karang untuk

mengalokasikan dana tersebut. Karena hasilnya pun tidak perlu dilaporkan pada Bank Indonesia.¹³²

BNI Syariah KC Tanjung Karang menyalurkan dana dalam bentuk *qardhul hasan* karyawan. Yaitu berupa pinjaman dana segar tanpa bunga yang ditujukan hanya untuk karyawan kontrak atau karyawan *outsourcing* BNI Syariah KC Tanjung Karang yang dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan penting yang mendesak seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, ataupun kebutuhan penting yang mendesak lainnya, yang sebelumnya ditinjau dahulu seberapa pentingnya pinjaman tersebut. Adapun besarnya dana yang bisa dicairkan adalah maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan diangsur dalam jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Bagi nasabah yang telah melunasi pinjaman kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka boleh mengajukan pinjaman kembali kepada BNI Syariah KC Tanjung Karang.¹³³

Proses pengajuan untuk nasabah pinjaman langsung datang ke kantor BNI Syariah KC Tanjung Karang dengan membawa kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, kemudian mengisi formulir-formulir pengajuan permohonan *qardhul hasan* yang isinya

¹³² Alwina Putri Dwigita, *Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Program Islamic Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi pada BNI Syari'ah Kantor Cabang Tanjung Karang)*. (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 193-194.

¹³³ *Ibid*, h. 195.

adalah besarnya dana yang diajukan serta dana yang dibutuhkan digunakan untuk keperluan apa dan jangka waktu masa waktu peminjaman. Untuk besarnya dana yang diajukan adalah Rp. 3.000.000,- diangsur selama sepuluh bulan untuk angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 300.000,- dan kebutuhan dana diajukan untuk keperluan membayar sewa kontrak rumah. Dana dapat dicairkan kira-kira tiga hari setelah proses pengajuan. Sebelumnya nasabah menandatangani surat perjanjian. Untuk biaya administrasi pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang menerapkan sebesar Rp. 50.000,- serta biaya 4 lembar materai 6000.¹³⁴

Berdasarkan beberapa contoh penggunaan dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang sangat membantu masyarakat menengah kebawah serta sektor kecil. Tak dapat dipungkiri bahwa hal inilah yang menjadi pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional yakni misi sosial yang dimiliki bank syari'ah. Dana non halal yang menjadi salah satu sumber pendistribusian pembiayaan *qardhul hasan* tersebut, merupakan kebijakan perbankan itu sendiri untuk pengalokasiannya yang terpenting adalah disalurkan untuk dana kebajikan umat.

¹³⁴ *Ibid*, h. 196.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Dana Non Halal Dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan merupakan suatu akad yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) khususnya perbankan syari'ah. Akad ini merupakan ciri pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional di mana dalam pembiayaan ini tidak sama sekali berorientasi mencari keuntungan (*tijarah*) melainkan mengedepankan misi sosial (*tabarru'*). Secara umum, *qardhul hasan* merupakan akad pinjam meminjam yang tidak disertai dengan keuntungan bagi pihak yang meminjamkan (0%) dalam hal ini bank syari'ah. Pihak peminjam (nasabah) harus mengembalikan uang yang dipinjam dengan jumlah nominal yang sama dalam jangka waktu yang telah disepakati. Namun, apabila terjadi sesuatu keadaan di luar kuasa (*force majeure*) nasabah seperti bencana alam atau musibah lainnya yang mengakibatkan nasabah tidak mampu membayarnya, maka pinjaman tersebut tidak wajib untuk dikembalikan. Di sinilah letak *hasan* tersebut hingga disebut sebagai akad *qardhul hasan*. Tidak semua nasabah bisa mengajukan pembiayaan ini melainkan hal ini dikhususkan bagi kaum *dhu'afa* dan untuk membantu sektor usaha bagi masyarakat menengah ke bawah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis dalam BAB II Landasan Teori, terdapat beberapa sumber dana yang dialokasikan untuk

pembiayaan *qardhul hasan* tersebut antara lain, infaq/shodaqoh, hibah/hadiah, denda dan pendapatan non halal. Pendapatan non halal ini diperoleh dari transaksi antara bank syari'ah dengan bank konvensional seperti pada penerimaan jasa giro dari bank konvensional hingga bank syari'ah mendapatkan bunganya dan lain sebagainya penerimaan yang tidak dapat dihindari oleh bank syari'ah dalam operasional bank tersebut. Syafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi Islam pun sepakat akan adanya dana non halal dalam sumber pembiayaan *qardhul hasan*. Dalam bukunya yang berjudul "Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek" telah dijelaskan bahwa Sumber dana *qardhul hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah. Selain sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama', melihat adanya sumber dana lain yaitu pendapatan-pendapatan non halal seperti jasa nostro pada bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C pada bank asing, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, dan pendapatan-pendapatan non halal lainnya.

Setelah penulis meneliti dari berbagai literatur yang telah dipaparkan pada BAB II Landasan Teori mengenai *qardhul hasan* juga sumber dananya yakni dana non halal, hal tersebut sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan sebagai pendukung keabsahan teori yang dipaparkan pada BAB III Skripsi ini. Terdapat tiga hasil penelitian yang penulis

cantumkan untuk menjelaskan penggunaan dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syari'ah.. Berikut penjelasan mengenai hasil penelitian tersebut.

Muhammad Imam Purwadi (2014) dalam hasil penelitiannya pada PT Bank Muamalat Indonesia, menjelaskan bahwa Bank Mu'amalat Indonesia menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* dengan salah satu sumber dana yang digunakan berasal dari dana non halal. Meskipun dalam penelitian tersebut tak secara gamblang dijelaskan dari mana asal dana non halal yang digunakan, namun pembiayaan *qardhul hasan* telah banyak tersalurkan untuk membantu serta menyumbang pengusaha kecil, pengurus bank yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Tercatat pada tahun 2010 telah tersalurkan dana sebesar Rp 22. 800.000.000,00 dan pada tahun 2011 sebesar Rp 11. 600.000.000,00.

Hendri Hermawan A. N (2008) dalam hasil penelitiannya pada Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta, menjelaskan bahwa Bank BRI Syari'ah tersebut menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* dengan salah satu sumber dana non halal yang digunakan. Dijelaskan dari hasil penelitian tersebut bahwa dana non halal diperoleh dari penerimaan jasa giro dari bank at Cabang DIY yang kemudian Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta terkadang mendapatkan keuntungan berupa bunga serta penerimaan lainnya yang kemudian tidak dapat dihindari oleh Bank BRI Syari'ah tersebut. Dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan *qardhul hasan*.

Pada tahun 2004-2008 telah tercatat sebesar Rp 10. 730. 899.-, dana *qardhul hasan* yang terkumpul. Alokasi pendistribusian dana tersebut disalurkan pada orang-orang yang berhak menerimanya.

Alwina Putri Dwigita (2018) dalam hasil penelitiannya pada Bank BNI Syari'ah Cabang Tanjung Karang, menjelaskan bahwa Bank BNI Syari'ah tersebut menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* yang disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari nasabah, karyawan serta masyarakat yang membayar zakat, menyalurkan infak dan sedekah pada Bank BNI Syari'ah Cabang Tanjung Karang. Tak hanya berasal dari dana tersebut, Alwina menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa dana *qardhul hasan* diperoleh pula dari dana pendapatan non halal yang diperoleh BNI Syari'ah Cabang Tanjung Karang. Dana non halal tersebut berasal dari penerimaan jasa giro dan dari nasabah berupa denda. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Bank BNI Syari'ah Cabang Tanjung Karang menyalurkan dana *qardhul hasan* pada karyawan jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, ataupun kebutuhan penting mendesak lainnya. Besarnya dana yang dicairkan dalam pembiayaan ini sebesar Rp 5.000.000,-.

Dari ketiga hasil penelitian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* benar-benar diaplikasikan di perbankan syari'ah. Hal tersebut sejalan dengan teori yang ada bahwa salah satu

sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari dana non halal. Walau demikian, pembiayaan *qardhul hasan* ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah kebawah yang memerlukan dana untuk usaha atau kebutuhan mendesak. Hal ini membuktikan bahwa bank syari'ah memiliki misi sosial kemasyarakatan dengan akad *non profit* berupa *qardhul hasan*. Walaupun pada implementasinya, tidak semua bank menyediakan pembiayaan tersebut.

B. Analisis Dana Non Halal dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan dana namun yang menjadi permasalahan adalah sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini salah satunya bersumber dari dana non halal. *Maqashid al-Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari'ah dan diwujudkan dalam kehidupan, inti dari teori ini adalah *jalb al-mashalih wa daf'u al-mafashid*, mewujudkan kemaslahatan dan menghindari keburukan. Maka istilah yang sepadan adalah maslahat. Dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun, sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya. Dikatakan maslahat apabila mampu memelihara 5 aspek pokok (*al-daruriyyat al-*

khamis) yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Jika dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*, hal tersebut sesuai dengan konsep maslahat yang ada. Telah diketahui pada pembahasan BAB III bahwa implementasi pembiayaan *qardhul hasan* sangat memberikan kontribusi manfaat pada nasabah serta masyarakat yang membutuhkan dan hal tersebut membawa kemaslahatan. Sebagaimana jika diuraikan berdasarkan 5 aspek pokok ((*al-daruriyyat al-khamis*) sebagai berikut.

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*): dalam pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan misi sosial untuk membantu masyarakat muslim khususnya dengan kriteria menengah kebawah merupakan bentuk *ta'awwun* yang sangat tepat bagi bank syari'ah sendiri. Bank syari'ah dapat merealisasikan amanahnya sebagai pemegang dana untuk membantu pihak-pihak khususnya saudara semuslim dengan menyalurkan dana kebajikan berupa *qardhul hasan*. Hal tersebut merupakan bentuk penjagaan agama bagi penyalur bantuan tersebut yakni bank syari'ah sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Tak hanya bagi bank syari'ah sebagai pihak pemberi dana, nasabah pun sebagai penerima dana *qardhul hasan* terjaga dari transaksi pinjaman yang berbunga yang

hukumnya haram. Hal tersebut merupakan realisasi dari menjaga agama.

- b. menjaga jiwa (*hifz al-nafs*): implementasi pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syari'ah dikhususkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti pengusaha kecil, nasabah kelas menengah ke bawah dan lain sebagainya. Maka demikian, pembiayaan ini merupakan bentuk penjagaan jiwa bagi pihak yang menerima dana *qardhul hasan* tersebut.
- c. menjaga akal (*hifz al-'aql*): melalui pembiayaan *qardhul hasan*, nasabah terbantu dalam penjagaan akal karena berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun dalam keadaan ekonomi rendah, namun masih mencari atau meminjam dana yang baik tanpa bunga kepada bank syari'ah.
- d. menjaga keturunan (*hifz al-nasl*): dalam pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan pinjaman kebaikan tanpa bunga melindungi keturunan dari harta yang haram. Jika melakukan pinjaman pada bank konvensional yang berbunga maka hal tersebut termasuk transaksi yang haram dan ketika harta haram tersebut dimakan, maka tujuan dari sebuah keluarga yang menginginkan jauh dari api neraka sebagaimana nasihat dalam al-qur'an tidak akan dapat tercapai.
- e. menjaga harta (*hifz al-mal*): pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan akad pinjaman tanpa adanya imbalan dalam artian bunga

0% merupakan bentuk penjagaan harta bagi pihak penerima pinjaman yakni menjaga dari harta yang haram. Begitupun bagi perbankan syari'ah terbebasa dari harta non halal karna sudah dialokasikan untuk pembiayaan *qardhul hasan*.

Dengan demikian, jika dilihat dari segi *maqashid syari'ah*, pembiayaan *qardhul hasan* benar-benar memiliki nilai kemaslahatan. Meskipun Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *halal wal haram fil Islam* menyatakan bahwa barang siapa yang mengumpulkan harta dengan riba, maksiat, permainan yang diharamkan, judi atau apa saja amalan yang diharamkan untuk membina masjid atau untuk projek-projek kebajikan atau sebagainya, maka hal tersebut tidak menjadi syafaat sekalipun niat tujuannya baik dan tidak diperbolehkan mencampuradukkan yang haram dengan yang halal.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, penulis cenderung pada nilai kemaslahatan yang terkandung dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Walaupun sejatinya salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan ini berasal dari dana non halal. Hal ini tidak serta merta tanpa alasan. Ada beberapa hal yang menjadi argumentasi penulis. Dalam sebuah kaidah fiqh telah dijelaskan bahwa menurut mayoritas ulama' yang menjadi standar, jika dana halal dan haram tercampur, maka yang dipilih adalah dana yang dominan karena hukum mayoritas seperti hukum keseluruhan.

لَا كُثْرَ حُكْمِ الْكُلِّ

Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan

Hal tersebut menegaskan bahwa dalam pembiayaan *qardhul hasan* tidak masalah jika di dalamnya terdapat dana non halal, karena mayoritas dananya terdapat dari dana halal.

Syaikh al-Qardhawi dan Prof. Qurrah pun berpendapat bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pendapat bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya namun tetap halal bagi penerimanya.

Hal tersebut di atas sangatlah sesuai dengan pembiayaan *qardhul hasan*. Meskipun salah satu yang menjadi sumber dana berasal dari dana non halal, namun pengalokasian dana tersebut kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan ini turut serta membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah. Sebagaimana firman Allah yang menganjurkan sesama muslim untuk senantiasa saling membantu.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ

أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.* (QS. Al-Hadiid: 11)

Kemudian diperkuat pula dengan hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR Ibnu Majah)

Dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* pun tidak masuk dalam pencatatan pemasukan bank, dana ini seluruhnya digunakan untuk dana kebajikan. Jadi bank syari’ah sama sekali tidak mengambil keuntungan dari dana tersebut. Semua tersalurkan kepada nasabah, masyarakat bahkan karyawan yang membutuhkan. Oleh karena itu, hadirnya pembiayaan ini menjadi sebuah solusi dan hal ini diperbolehkan oleh syari’at karna dana non halal menjadi halal bagi penerimanya dan haram bagi pemiliknya.

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non-muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab pada bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa. Pun perbankan syari'ah tidak dapat terhindar dari penerimaan dana non halal karena masih akan selalu berkaitan dengan bank konvensional dalam hal transaksi dan bank konvensional pun masih mendominasi di seluruh penjuru negeri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam Analisis Dana Non Halal dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *qardhul hasan* benar-benar diaplikasikan di perbankan syari'ah. Hal tersebut sejalan dengan teori yang ada bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari dana non halal. Walau demikian, pembiayaan *qardhul hasan* ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah kebawah. Hal ini membuktikan bahwa bank syari'ah memiliki misi sosial kemasyarakatan dengan akad *non profit* berupa *qardhul hasan*.
2. Jika dilihat dari segi *maqashid syari'ah*, pembiayaan *qardhul hasan* benar-benar memiliki nilai kemaslahatan dan mampu menjaga 5 aspek pokok (*al-daruriyyat al-khams*). Walaupun sejatinya salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan ini berasal dari dana non halal namun setelah dianalisis dengan *maqashid al syari'ah*, dalil qur'an dan as-sunnah serta kaidah fiqih, bahwa dana non halal itu haram bagi pemiliknya namun tetap halal bagi penerimanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam Analisis Dana Non Halal dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan *qardhul hasan* seharusnya lebih dimaksimalkan lagi untuk seluruh lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syari'ah. Mengingat masih jaranganya perbankan syari'ah yang menyediakan pembiayaan ini. Penerimaanya pun juga turut serta harus disesuaikan dengan kriteria bukan hanya terkhusus pada karyawan saja. Khawatir secara kriteria ada yang lebih wajib dibantu jika dibandingkan dengan karyawan yang ada. Perbankan syari'ah pun harus melakukan pencatatan yang terpisah antara dana non halal dengan yang halal agar tidak tercampur. Hal ini juga akan sangat baik sekali jika kedepan, dalam sebuah LKS hanya menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* saja yang akan berfokus pada akad tabarru' (*social oriented*). Menimbang bahwa pembiayaan *qardhul hasan* ini memiliki peluang besar untuk memajukan perekonomian umat khususnya masyarakat kecil.
2. Pembiayaan *qardhul hasan* ini diharapkan untuk selalu dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat muslim khususnya agar dapat terhindar dari pinjaman-pinjaman berbunga. Sehingga akan selaras dengan tujuan syari'at yang ada bahwa sesama muslim turut serta harus selalu saling membantu dalam hal kebaikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG